

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan kebijakan yang bertujuan untuk melayani segala kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah adalah tersedianya fasilitas umum. Pemerintah memiliki tugas dan peranan dalam menyediakan fasilitas umum untuk memudahkan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fasilitas umum yang sering menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah pasar tradisional. Pasar tradisional dijadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pusat aktifitas sebagian besar masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan maupun kebutuhan sosial. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung.¹

Pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan segala macam kebijakan yang mengatur tentang pasar tradisional. Pemerintah selalu berupaya dalam membenahi pasar tradisional untuk menciptakan kenyamanan jika masyarakat beraktifitas di pasar tradisional sehingga keberadaannya akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar tradisional mulai nampak dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan

¹ Murti Sumarni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 33.

oleh pemerintah. Semangat pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional telah dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 53/ M-DAG/ PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut merupakan bentuk dari semangat Undang-Undang No.05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²

Pemerintah selain dengan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan di atas, dalam menjaga eksistensi pasar tradisional, juga telah mengeluarkan peraturan yang paling baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Disebutkan dalam peraturan tersebut dalam pasal satu ayat (2) yang berbunyi Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan mengacu pasal tersebut, pemerintah harus melindungi pasar tradisional, dengan segala upaya apapun tentunya dengan tidak melanggar undang-undang yang ada agar pasar tradisional bias bersaing dengan pasar modern.

² Ina Primlana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri* (Bandung : PT Alfabeta. 2009), hlm. 70.

Secara hukum, memang pasar-pasar tradisional telah mendapatkan perlindungan tentang keberadaannya namun kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional masih lebih menekankan pada perbaikan fisik bangunan pasar. Masih sangat jarang yang disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya yaitu pedagang pasar dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pengalaman empiris di banyak kabupaten dan kota, setelah dilakukan renovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar selama kurun waktu tiga-lima tahun kemudian, bangunan pasar yang telah direnovasi atau dibangun kembali beserta pengelolaan pasarnya tampak kembali *semprawut* serta kondisi pasar kembali kumuh dan kotor sama keadaannya seperti belum dilakukan renovasi atau pembangunan kembali pasar. Terlebih lagi, setelah direnovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar, kegiatan perawatan atau pemeliharaan sangat minimal dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran daerah. Hal ini terjadi karena kebijakan revitalisasi pasar tradisional masih hanya sebatas menyentuh bangunan fisik pasar semata yang sering kali kurang diikuti dengan aktifitas perawatan atau pemeliharaan bangunan fisik pasar.

Proses revitalisasi tidak hanya membutuhkan peran dari pemerintah saja, dibutuhkan juga partisipasi dari para pedagang untuk mensukseskan pelaksanaan revitalisasi pasar. Partisipasi masyarakat khususnya partisipasi dari pedagang sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Keberhasilan atau kegagalan revitalisasi pasar tradisional sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari peran pemerintah saja. Karena pedagang juga ikut terlibat langsung dalam kegiatan revitalisasi pasar tradisional. Banyak penyebab yang melatarbelakangi kondisi ini. Maka dibutuhkan pembinaan ke pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam upaya memelihara pasar agar revitalisasi pasar berhasil dilaksanakan.

Maka mulai tahun 2012, Kementerian Perdagangan memberikan bimbingan teknis kepada para pedagang bersama para pengelola pasar tradisional tentang cara berjualan yang baik, seperti mengupayakan dan memelihara kebersihan pasar, cara berdagang yang baik dengan penataan barang dagangan yang menarik pembeli dan pengelolaan pasar. Maka dari itu dibutuhkan partisipasi aktif pedagang dalam kegiatan revitalisasi terutama pada saat relokasi sementara agar revitalisasi pasar tradisional berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pedagang memang sangat dibutuhkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pasar tradisional.

Menyikapi segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Kota Semarang sesuai dengan visinya yaitu kota metropolitan yang religius, tertib dan berbudaya sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010, Kota Semarang memiliki perkembangan perdagangan yang cukup kompetitif. Pemerintah Daerah Kota Semarang mengadakan pembangunan dan perubahan pada beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Semarang. Fasilitas umum tersebut antara lain adalah pasar tradisional. Berdasarkan dari peraturan tersebut, maka diperlukan suatu pemecahan penanganan masalah secara terstruktur, melalui

disusunnya *Masterplan* Pasar oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan penanganan pasar di Kota Semarang.³

Dinas pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrakstruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota Semarang. Pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota Semarang adalah dalam hal pelayanan yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan penggunaan fasilitas lain yang mendukung. Pasar tradisional yang selama ini lekat dengan kumuh, becek dan tidak nyaman untuk bertransaksi sudah mulai banyak mendapat perhatian dari Dinas Pasar untuk segera diperbaiki. Dinas Pasar mulai fokus membenahi dan mengelola pasar-pasar tradisional di Kota Semarang.⁴

Sebagai salah satu contoh pengelolaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional adalah dengan pelaksanaan program revitalisasi Pasar Karangayu.⁵ Pasar Karangayu sendiri merupakan salah satu pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Semarang, khususnya wilayah Semarang Barat dan sekitarnya. Kondisi

³ Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2010

⁴ Peraturan Wali Kota Semarang nomor 41 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang

⁵ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional

pasar yang kurang rapih dan kurang bersih membuat pembeli merasa tidak nyaman dalam berbelanja. Beberapa pipa pembuangan air juga sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika hujan datang air mengalir dari atas dan bocor melalui pipa-pipa yang sudah usang dan tidak terawat dengan baik, hal itu menjadikan situasi pasar menjadi lebih tidak nyaman karena beceknya lantai yang juga berbahaya bagi pedagang maupun pembeli yang melaluinya. Dalam hal ini kondisi bangunan pasar yang sudah tua juga menjadi fokus dalam revitalisasi pasar mengingat Pasar Karangayu terakhir direnovasi pada tahun 1980-an, sehingga dalam perjalanannya banyak mengalami kerusakan di beberapa bagian. Disamping itu jumlah pedagang yang melebihi kapasitas membuat penataan lapak-lapak dagangan menjadi tidak rapih. Dipagi hari lapak pedagang bahkan sering *membludak* hingga ke jalan raya sehingga membuat situasi lalu lintas menjadi padat dan sangat mengganggu. Untuk beberapa alasan tersebut dicetuskanlah rencana revitalisasi Pasar Karangayu oleh Dinas Pasar Kota Semarang.

Revitalisasi pasar diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat akan pasar tradisional yang terkesan kumuh, kotor, becek dan tidak rapih. Serta untuk memberikan kesan bahwa meskipun bersifat tradisional, namun dirancang sebagai pasar semi modern agar tetap bersih, rapi, tidak kumuh, tertib, nyaman serta dikategorikan sesuai jenis dagangannya.

Dalam hal proses revitalisasi nanti diharapkan adanya kerjasama antara para pedagang dan pemerintah untuk memudahkan jalannya proses pembongkaran hingga pembangunan kembali Pasar Karangayu. Partisipasi pedagang maupun

kesadaran pedagang dalam kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan kebijakan dari pemerintah.

Kebijakan revitalisasi yang melibatkan partisipasi pedagang ini memang harus dilakukan ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada pasar tradisional dan harus segera dicarikan jalan keluar dan jalan keluar yang diambil tentu saja melibatkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori William N. Dunn yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu proses ketika pemerintah dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, di mana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggungjawab melayani kepentingan umum.⁶

Kebijakan pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kebijakan revitalisasi ini menggunakan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat melalui aspirasinya kemudian ditampung dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Aspirasi masyarakat yang merupakan salah satu wujud yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini nantinya ditampung oleh pemerintah saat merumuskan suatu kebijakan yang akan diambil. Kebijakan yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat ini merupakan salah satu wujud penerapan teori William N. Dunn di mana teori ini merupakan bagian dari studi ilmu pemerintahan yang dapat

⁶ Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004) hlm. 36.

diterapkan dalam penyelesaian masalah sosial seperti permasalahan pasar tradisional.

Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan teori milik William N. Dunn ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk pengembangan studi ilmu pemerintahan. Maka partisipasi penting untuk dilakukan dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan, karena suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan studi ilmu pemerintahan nantinya akan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut juga bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan dari kebijakan revitalisasi apakah pro masyarakat ataukah pro elit pemerintah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat berarti kebijakan revitalisasi tersebut semakin pro terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana partisipasi dalam proses penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Melihat dan mencermati beberapa permasalahan di atas, maka peneliti berminat mengadakan penelitian berjudul : **Partisipasi Pedagang Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus : Pasar Karangayu Kota Semarang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan penelitian, sebagai berikut:

1. Sejah mana pasrtisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Karangayu?
2. Bagaimana proses partisipasi dalam revitalisasi Pasar Karangayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi pedagang dalam rencana revitalisasi pasar tradisional.

Selain itu, fokus tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sejauh mana partisipasi yang diberikan pedagang dalam perencanaan dan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses partisipasi pedagang yang ikut terlibat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori mengenai partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi Pasar Karangayu sebagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan peneliti.

2. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi pemerintah Kota Semarang mengenai langkah kebijakan apa yang harus mereka ambil dalam guna melengkapi fenomena sosial masyarakat semacam itu dan menghadapi berbagai kritik dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan oleh pemerintah kota.

3. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian diharapkan dapat menghasilkan informasi untuk pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan.

1.5 Kerangka Teori

Setiap penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru atau menemukan jawaban dari suatu pertanyaan, untuk melakukan penelitian diperlukan pedoman diantaranya mempunyai teori yang cukup. Pembahasan mengenai penelitian ini memerlukan berbagai konsep dan studi kepustakaan. Konsep-konsep inilah yang menjadi landasan teori penelitian.

1.5.1 Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan

1.5.1.1 Konsep Partisipasi

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi. Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di kamus sosiologi disebut bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.⁷ Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan,

⁷ Theresia Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 196

kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.⁸ Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁹

Mikeselen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau sekelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring* proyek agar

⁸ Ach. Wazir., *et al.*, ed, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Sekretariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS dan STD Prevention and Care Project, Jakarta, 1991, hlm. 91.

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Depok, 2007, jlm. 64.

supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial;

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau kelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai tahap evaluasi.

1.5.1.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain:¹⁰

Tabel 1.1 Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar	Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi
Hamijoyo, Chapin & Holil	Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
Hamijoyo, Holil & Simanjuntak Pasaribu	Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
Hamijoyo & Simanjuntak Pasaribu	Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
Hamijoyo & Simanjuntak Pasaribu	Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Hamijoyo & Simanjuntak Pasaribu	Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau bahkan buah pemikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Hamijoyo & Simanjuntak Pasaribu	Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
Chapin & Holil	Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
Chapin & Holil	Partisipasi representative. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandate kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

¹⁰ Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Litbang Sosial, Bandung, 1980, hlm. 81-82.

1.5.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:¹¹

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding Together*) dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*Action Together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting Independent Community Interest*) di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

1.5.2 Teori Partisipasi pada Revitalisasi Pasar Tradisional

1.5.2.1 Revitalisasi Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya).

¹¹ John Geveta, et al, *Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, The British Council, Jakarta, 2001.

Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

Salah satu cara revitalisasi yaitu menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi dan kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi bersama dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. Dasar pertimbangan melakukan kerjasama revitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.¹²

1.5.2.2 Pendekatan Partisipasi

Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen, beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Pendekatan Pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumberdaya. Dengan demikian partisipasi

¹² Mangeswuri dkk, *Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 2 No 1 Desember 2010.

tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.

2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan diberikan pilihan untuk terikat pada suatu kegiatan dan bertanggungjawab atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar putusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

Agar memperbaiki kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka usaha untuk dapat menggerakkan partisipasi masyarakat:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata.
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*respons*) yang dikehendaki.
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*) yang dikehendaki secara berlanjut.

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica dalam Ndraha berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:¹³

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berpengalaman dalam pengambilan keputusan.

1.5.2.3 Alasan Pentingnya Partisipasi

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak

¹³ Ndraha, Talidzuhu, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 123.

demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.¹⁴

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

1.5.2.4 Syarat Tumbuhnya Partisipasi

Menurut Slamet, menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:¹⁵

1. Kesempatan untuk Berpartisipasi

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk berpartisipasi. Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.

Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini adalah:

¹⁴ Conyers, Diana, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press, 1991, hlm. 154.

¹⁵ Diakses dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.
Diunduh pada tanggal 22 Maret 2017

- a. Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah.
 - b. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
 - c. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
 - d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/pelengkapan penunjangnya.
 - e. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
 - f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Kemauan untuk Berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.

- c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri.
- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan terciptanya tujuan pembangunan.
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Berlandaskan pada konsep-konsep di atas, maka tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dapat diupayakan melalui:

- a. Pemberian kesempatan yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dan bukanlah pemberian kesempatan yang dilandasi oleh prasangka buruk agar mereka tidak melakukan pengrusakan.
- b. Pemberdayaan yang intensif dan berkelanjutan, yang tidak saja berupa penyampaian informasi tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat. Melainkan juga dibarengi dengan dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi.
- c. Berkaitan dengan dorongan dan harapan yang disampaikan, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat secara langsung dan atau

tak langsung dinikmati sendiri maupun yang akan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

3. Kemampuan untuk Berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah:

- a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan. Yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki.
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan lain yang tersedia secara optimal.

1.5.2.5 Faktor Partisipasi dan Pembangunan

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat merupakan hal yang menyebabkan masyarakat untuk bersedia mengikuti/ikut serta dalam segala bentuk kegiatan/kebijakan yang sebelumnya telah dibentuk. Faktor yang mempengaruhi masyarakat terbagi menjadi dua bagian yakni faktor internal (dari dalam masyarakat) dan juga faktor eksternal (dari luar masyarakat). Dengan melihat faktor-faktor partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan menunjukkan berhasil atau tidaknya kegiatan/kebijakan yang dilakukan.

Menurut Slamet, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan mata pencaharian.

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh seorang wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapis sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.

2. Usia

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

3. Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomitmen dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

5. Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi, misalnya menghadiri pertemuan-pertemuan.¹⁶

Menurut Holil terdapat beberapa unsur/faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Adanya kesamaan iklim sosial. Kesamaan baik dalam keadaan ekonomi, pendidikan, serta budaya. Adanya kesamaan iklim sosial dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Salah satu hal yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi karena masyarakat berada dalam kesamaan iklim lingkungan, baik kesamaan dalam kondisi ekonomi, pendidikan, maupun budaya. Lingkungan sangat berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat cenderung akan berpartisipasi apabila lingkungan di wilayahnya baik keluarga, tetangga, teman, dll., berada dalam lingkungan yang masih dalam keadaan propartisipasi.
2. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial. Adanya kesempatan untuk berpartisipasi juga menjadi salah satu faktor partisipasi. Masyarakat yang diberikan kesempatan akan lebih merasa dihargai dalam setiap

¹⁶ Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2003.

mengeluarkan ide/pendapat maupun masukan salam rencana maupun proses pembangunan. Masyarakat akan dianggap “ada” tidak membedakan antara hak laki-laki maupun perempuan selama berjalannya program sehingga menjadikan peran masyarakat untuk keberhasilan suatu program tersebut sangat berarti.

3. Kemampuan dan kemauan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. Masyarakat berpartisipasi juga didorong dengan adanya kemauan dan kemampuan dari dalam dirinya sendiri untuk mengubah keadaan lingkungan menjadi lebih baik. Masyarakat akan lebih mengerti keadaan lingkungannya sendiri, sehingga masyarakat memiliki peran penting untuk mengatasi masalah dan memperbaiki/membangun keadaan yang ada dalam lingkungannya.
4. Pembentukan organisasi dalam suatu proses pembangunan juga akan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan adanya organisasi akan menjadi bentuk wadah masyarakat yang ingin mengutarakan ide/pemikirannya sesuai dengan tempatnya. Tahapan-tahapan pembangunan yang dibuat juga akan lebih terstruktur sehingga pembangunan akan tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
5. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat. Kepekaan masyarakat untuk memperbaiki keadaan lingkungannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat mengerti akan masalah-

masalah yang dihadapinya dan mengerti apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam lingkungannya perlu diperbaiki. Sehingga dengan hal itu masyarakat akan berpartisipasi untuk mengatasi segala macam kendala/permasalahan yang terjadi.

Ada dua faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Conyers yaitu:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau berkemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak memiliki pengaruh rencana akhir.
2. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

1.5.3 Partisipasi Para Aktor yang Terlibat dalam Revitalisasi Pasar

1.5.3.1 Dinas Pasar sebagai Pelaksana Kebijakan Revitalisasi Pasar

Dasar hukum pembentukan Dinas Pasar Kota Semarang adalah Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang (Lembaran Kota Tahun 2008 Nomor 41).¹⁷

¹⁷ Peraturan Wlikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang, tugas pokok Dinas Pasar Kota Semarang adalah Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan organisasi Dinas Pasar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pemetaan
 2. Seksi Perijinan
 3. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban
4. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan
 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan
 3. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban
5. Bidang Perdagangan Kaki Lima, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan dan Pengendalian
 2. Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan
 3. Seksi Operasional dan Sarana Prasarana

6. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Seksi Penetapan
2. Seksi Penagihan
3. Seksi Penerimaan

7. UPTD, terdiri dari :

- UPTD Pasar Wilayah Johar
- UPTD Pasar Wilayah Karimata
- UPTD Pasar Wilayah Bulu
- UPTD Pasar Wilayah Karangayu
- UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh
- UPTD Pasar Wilayah Pedurungan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelolaan Pasar Karangayu berada di bawah UPTD Pasar Karangayu dengan menunjuk Kepala Pengelola Pasar Karangayu sebagai penanggungjawab pengelola Pasar Karangayu untuk memudahkan komunikasi dan kerjasama antara UPTD Wilayah Karangayu dan Dinas Pasar.

Partisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar adalah sebagai pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dinas Pasar yang manaungi pasar di Kota Semarang melakukan pembahasan kebijakan bersama dengan DPRD dan Pemerintah Kota Semarang. Sebagai dinas yang ditunjuk dalam pelaksanaan revitalisasi. Dinas Pasar melakukan pendataan pedagang dan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar, serta membentuk tim dalam pelaksanaan revitalisasi.

Tahapan Penataan dan revitalisasi Pasar Karangayu yang dilakukan oleh Dinas Pasar sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada para pedagang
2. Pemetaan tempat dasaran
3. Penomoran tempat dasaran
4. Penataan pedagang, dikelompokkan sesuai dengan jenis jualan
5. Pengawasan dan pemantauan setelah penataan
6. Pengawasan penindakan oleh Pemerintah Kota Semarang apabila ada pelanggaran

1.5.3.2 Partisipasi Pedagang Pasar

Menurut Damsar pedagang pasar adalah orang atau institusi yang menjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Geertz menyatakan bahwa peranan pedagang dalam suatu pekerjaan bersifat non-amatir, memerlukan kecakapan teknis dan membutuhkan segenap waktu. Adapun hubungan antara pedagang itu bersifat spesifik, ikatan-ikatan komersial itu sama sekali dipisahkan dari ikatan-ikatan sosial persahabatan, ketetanggaan bahkan kekerabatan.

Di pasar tradisioanal juga terjadi stratifikasi sosial antar pedagang. Di pasar terbentuk semacam kasta yang tak kentara diantara pedagang. Pedagang pakaian memiliki kedudukan tertinggi, diikuti pedagang penjual alat-alat rumah tangga. Selanjutnya adalah pedagang yang memiliki kios atau toko di dalam pasar. Kedudukan terbawah ditempati oleh pedagang yang tidak memiliki kios di dalam pasar yang menggelar dagangannya di lantai pasar. Di pasar tradisional

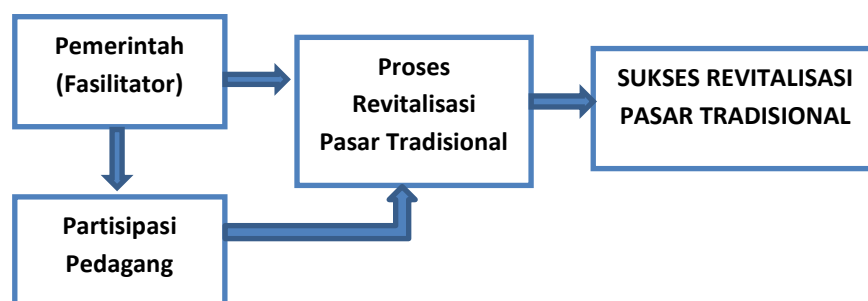
biasanya pedagang yang tidak mempunyai kios di dalam pasar atau disebut pedagang selter berada di pinggir-pinggir pagar. Sedangkan pedagang yang menggelar dagangannya di lantai dasaran biasanya berjualan dipagi hari sebelum pasar buka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedagang adalah orang yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Partisipasi yang dilakukan oleh Pedagang Pasar dengan menyampaikan aspirasinya yang disampaikan kepada pengelola pasar untuk kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi hingga akhirnya menghasilkan perubahan yang lebih baik yang menjadi harapan semua pedagang di pasar tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya Mardalis kerangka konsep atau kerangka pemikiran adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Dalam penelitian ini kerjasama pemerintah dan partisipasi pedagang dalam revitalisasi pasar tradisional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey, LP3S, Jakarta.

1.7 Definisi Konseptual

Menurut Masri Singarimbun konsep adalah unsur penelitian dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomenal sosial.¹⁸

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pemerintahan merupakan partisipasi aktif yang dilakukan masyarakat untuk terlihat untuk terlibat aktif baik itu perseorangan, kelompok atau dalam suatu masyarakat dalam suatu proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dalam pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial bersama dengan pemerintah.
2. Partisipasi dalam revitalisasi pasar merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar untuk menjadikan pasar menjadi lebih baik. Dalam revitalisasi pasar melibatkan berbagai aktor pelaksana kebijakan antara lain Dinas Pasar, pengelola pasar dan masyarakat baik itu pedagang maupun pembeli.
3. Dalam revitalisasi melibatkan berbagai pihak antara lain Dinas Pasar, Pengelola Pasar dan Pedagang.
4. Partisipasi pedagang merupakan upaya yang dilakukan oleh pedagang untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi dalam poses revitalisasi pasar tradisional.

¹⁸ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 80-81.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruksivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpertasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci.

Ada 5 (lima) ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu:

1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya,

menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung.

2. Memiliki sifat deskriptif analitik

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptik analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian., tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

3. Tekanan pada proses bukan hasil

Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya

memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensi saja. Pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan, prosedur, alasan-alasan dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan di mana dan pada saat mana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Peneliti tidak perlu mentransformasi data menjadi angka untuk menghindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna suatu proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan teori sebagai suatu temuan atau penelitian tersebut.

4. Bersifat induktif

Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain baik waktu maupun tempat. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

5. Mengutamakan makna

Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptik analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Generalisasi tak perlu dilakukan sebab deskripsi dan interpretasi terjadi dalam konteks dan situasi tertentu. Realitas yang kompleks dan selalu berubah menuntut peneliti cukup lama berada di lapangan.

1.8.2 Situs Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi Pasar Karangayu. Sedangkan fokus penelitian ini adalah Pasar Karangayu Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan subjek ataupun informan adalah individu atau kelompok yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti di mana diharapkan dari mereka akan diperoleh informasi lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Informan adalah orang yang dapat membantu proses penelitian lewat informasi yang ia berikan terkait hal yang berkenaan dengan fenomena penelitian. Subjek penelitian yang akan penulis teliti adalah Dinas Pasar selaku pelaksana program revitalisasi Pasar Karangayu khususnya Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar Kota

Semarang, Kepala Pasar Karangayu sebagai pelaksana proses dari rencana revitalisasi Pasar Karangayu khususnya Ketua Kelompok Pedagang, serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan.¹⁹ Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang, Kepala Pengelola Pasar Karangayu, Ketua PPJP Karangayu dan Pedagang Pasar Karangayu

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan perlengkapan bagi data primer. Sumber data sekunder yang digunakan:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

¹⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 53/ M-DAG/ PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- e. Artikel dan berita yang berasal dari Koran atau media elektronik tentang Pasar Karangayu.
- f. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang.

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran seseorang serta bagaimana pandangannya tentang lingkungan di sekitarnya. Teknik wawancara merupakan suatu proses jawab lisan dalam dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan secara fisik antara peneliti dan informan. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis akan menggunakan panduan interview (*interview guide*) yang berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Pada tahap ini wawancara dilakukan kepada:

- a. Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang

- b. Kepala Pengelola Pasar Karangayu
 - c. Ketua PPJP Karangayu
 - d. Pedagang Pasar Karangayu
2. Observasi

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum, dibandingkan dengan observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Tujuan daripada penelitian kualitatif adalah memahami perilaku subjek secara apa adanya. Hal ini berbeda dengan observasi pada penelitian kuantitatif yang membatasi observasi pada ringkasan berupa angka-angka dalam mengamati subjek penelitian. Observasi pada penelitian berbentuk narasi atau deskripsi dari hal-hal yang dilakukan subjek dalam kondisi yang alami (*natural settings*). Secara umum, observasi dibagi menjadi dua, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

3. Dokumentasi

Menurut Gubs dan Licoln, dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau *record*.²⁰ Dokumen dapat berupa dokumen pribadi (misal: buku harian, surat pribadi atau *autobiografi*) dan dokumen resmi. Dalam

²⁰ Punch dalam Miles dan Huberman dalam Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKiS, Pelangi Aksara, 2008), hlm. 104

penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan dokumen resmi berupa foto dan gambar.

1.8.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data di lapangan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan yang melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sesuai dengan fokus penelitian terkait dengan implementasi kebijakan tersebut.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan atau menampilkan hal-hal pokok atau data yang sesuai dengan fokus penelitian. Kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang akan ditempuh selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

²¹ Punch dalam Miles dan Huberman dalam Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008), hlm. 104.

Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dari awal hingga akhir. Kesimpulan ini bersifat longgar dan tetap terbuka. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.